

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ach Ilyasi, *Governansi Digital: Transformasi Digital dalam Administrasi Publik*, Bandung: Widina Media Utama 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar 2020-2024
- Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- BKKBN, *Panduan Penggunaan Aplikasi E-Visum Generasi 4 Versi Mobile*, Jakarta: BKKBN 2020
- David L. Carter, 1999, *Dimensi Teoritis dalam Penyalahgunaan wewenang oleh Petugas Polisi*, Jakarta: Citra Manunggal.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana 2023
- Iman Jalaludin Rifa'I, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Serang: Pt Sada Kurnia Pustaka.
- JCT Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prajudi Atmosudirjo, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmadi, S.ag., M.Pd.I., 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan: Antasari Press.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, Bandung: PT. Alfabeta.

Suharsimi Arikanto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

UNDP, *Governance for sustainable human development : a UNDP policy document*, New York: UNDP, 1997

Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BKKBN.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Penyuluh Keluarga Berencana PKB di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementrian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

C. Jurnal/Artikel

Andre Kawulur dan Salmin Dengo, 2021, Peranan BKKBN Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1

Eko Sigit Raharjo dan Roy Valiant Salomo, 2019, Implementasi Kebijakan Pengukuran Kinerja Penyuluh Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Melalui Aplikasi *E-Visum* di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 6, No. 2

Galang Asmara, 2022, “Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum”, *Jurnal Diskresi*, Vol. 1, hlm. 4

Hikmah Muhaimin, 2025, Transformasi Teknologi Dalam Birokrasi: Analisis Dampak Digitalisasi Terhadap Efisiensi Birokrasi, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, No. 1

Indra Kristian, 2023, Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia, *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 21, No. 1

Janana Badra, 2023, Analisis Faktor Sumber Daya pada Implementasi Kebijakan Aplikasi e visum Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Grobogan, Jiap : *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 1

Juniati dan Aulia Nurdiansyah, 2023, Pola Pengelolaan Arsip Secara Digital dalam Mendukung Efektivitas Organisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, *Ikomik: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*, Volume. 3, No. 1

Ledy Octaviani Iqmy dan Vida Wira Utami, 2022, Peran Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2022, *Jurnal Perak Malahayati : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, Vol. 4, No. 2

Maulidatur Rohmah dan Eriyanto, 2020, “Penerapan Aplikasi Mobile Untuk Pelaporan Kinerja Pegawai Dalam Mendukung *E-Government*”, *Jurnal Pikom*, Vol. 21, hlm. 32

Moenir, 2021, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Dikutip dalam Susetyo Arief Hidayat, 2022, Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good

Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kecamatan Semarang Timur), Skripsi Fisip Untag Semarang.

Mohammad Yuhdi, 2020, “Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah”, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 15, hlm. 77

Muhammad Arif Rivaldo, 2024, Problematika Pelayanan Publik di Kabupaten Muara Enim, The Officium Noble Jurnal, Vol. 1, No. 1

Muhammad Salman Jabbar Sangaji, Jusuf Irianto, 2025, “Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital”, Jejaring Administrasi Publik, Vol. 1, hlm. 58

Nugraha Rachmatullah, 2022, Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government, Jurnal Fasilkom, Vol.12, No. 1

Riris Kusmiyati, 2023, Digitalisasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Peluang Dan Tantangannya), Komunikologi : Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial, Vol. 7, No. 1

Susetyo Arief Hidayat, 2022, Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kecamatan Semarang Timur), Skripsi Fisip Untag Semarang.

Wuryan Andayani, 2024, Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Elektronik Government Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 6, No. 2

Yurri Apriana Rudiansyah, 2021, Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jurnal Feb Unmul, Vol. 18, No. 1

D. Internet

BKN, “ Digitalisasi Birokrasi Pemerintahan: Mewujudkan Layanan Publik yang Efisien dan Modern”, BKN Palembang, Diakses pada 02 Juli 2025. <https://palembang.bkn.go.id/digitalisasi-birokrasi-pemerintahan-mewujudkan-layanan-publik-yang-efisien-dan-modern/#:~:text=Pengertian%20Digitalisasi%20Birokrasi%20Pemerintahan&text=Proses%20ini%20melibatkan%20pengelolaan%20data,interaksi%20antara%20pemerintah%20dan%20masyarakat>,

Gusbroer, “Konsekuensi Alih Kelola ke Pusat: PKB Tidak Kirim Laporan Kegiatan 1 Hari, Tunjangan Dipotong 3%.”, ipekgunungkidul, Diakses pada 28 Mei 2025 <https://www.ipekgunungkidul.com/2017/11/konsekuensi-alih-kelola-ke-pusat-pkb.html?m=1>

Hostinger, “Apa Itu JSON? Penjelasan, Penggunaan, dan Contoh JSON”,
Hostinger, Diakses pada 17 Agustus 2025

<https://pu.tanahdatar.go.id/page/kabupaten-tanah-datar>

<https://www.hostinger.com/id/tutorial/apa-itu-json>

Nurul Hamdi, “Website Kabupaten Tanah Datar”, *Dinas Pekerja Umum dan Perumahan rakyat*, Diakses Pada 11 Agustus 2025.

Pewartar Ibek Melsasail, “Transformasi BKKBN Menjadi Kemdukbangga, Refleksi Filosofis dan Perubahan Peran”, *Tribun Maluku*, Diakses pada 02 Juli 2025.

<https://www.tribun-maluku.com/transformasi-bkkbn-menjadi-kemdukbangga-refleksi-filosofis-dan-perubahan-peran/02/01/>

